



Analisis Implementasi Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Paud Hi) Di Kabupaten Bandung

Analysis of the Implementation of the Integrative Holistic Early Childhood Development Program (Paud Hi) in Bandung Regency

Ruli Isnani dan Fitra Hadiansyah

Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung

isnanimiruli@gmail.com¹, fitrahadiansyah45@gmail.com²

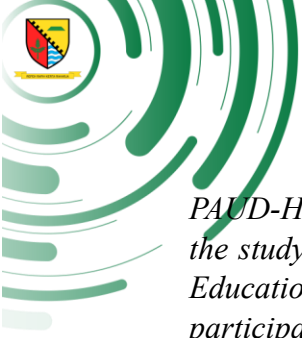
Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pengembangan anak usia dini holistik integratif (paud hi) di Kabupaten Bandung yang dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak; serta analisis terhadap hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, survey dan kajian literatur. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari praktisi dan stakeholder dalam bidang PAUD-HI yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa Implementasi Program Paud Hi Bidang Pendidikan Pemerintah sudah berupaya meningkatkan akses dan partisipasi anak di semua lembaga PAUD; memberikan bantuan insentif bagi kesejahteraan guruserita memberikan pelatihan-pelatihan terkait PAUD HI; serta belum banyak satuan PAUD yang bisa mandiri atau mendapat bantuan dari LSM/ CSR terkait program PAUD HI. Selain itu, Implementasi Program Paud Hi Bidang kesehatan, hampir semua satuan PAUD sudah melakukan integrasi dengan lembaga kesehatan yang ada di daerahnya. Implementasi Program Paud Hi Bidang perlindungan anak di Kabupaten Bandung, sudah terdapat inovasi dari Disdukcapil dengan layanan pembuatan akte kelahiran serta membuat Kartu Identitas Anak sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak; Di bidang pengasuhan, telah terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Satuan PAUD, dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; Dalam bidang kesejahteraan anak, sudah terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkannya dengan kerjasama yang dilakukan antara dinas-dinas terkait, namun masih berdasar ketokohan Bunda PAUD. Analisa Implementasi PAUD HI di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa praktek baik di beberapa satuan PAUD terkait dengan implementasi PAUD-HI, akan program PAUD-HI yang telah dilaksanakan seringkali masih dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi. Kendala-kendala tersebut menjadi penghambat keberhasilan PAUD-HI ini

Kata Kunci: pendidikan anak usia dini, holistik, pendidikan, program

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the holistic integrative early childhood development (PAUD HI) program in Bandung Regency from the fields of education, health, protection, care and child welfare; as well as analysis of obstacles in its implementation. The approach used is descriptive qualitative using interviews, surveys and literature reviews. Informants in this study were selected using purposive sampling. Informants in this research were selected using purposive sampling consisting of practitioners and stakeholders in the



PAUD-HI field consisting of representatives from various related elements. The findings of the study show that the implementation of the Early Childhood Education Program in the Education Sector of the Government has attempted to increase children's access and participation in all PAUD institutions; providing incentive assistance for teacher welfare and providing training related to HI PAUD; and not many PAUD units can be independent or receive assistance from NGOs/CSR related to the HI PAUD program. Apart from that, in the implementation of the Early Childhood Education Program in the health sector, almost all PAUD units have integrated with health institutions in their regions. Implementation of the Early Childhood Education Program in the field of child protection in Bandung Regency, there has been innovation from Disdukcapil with services for making birth certificates and making Child Identity Cards as a form of protection for children's rights; In the field of care, there have been several initiatives carried out by the PAUD Unit, in collaboration with various related parties; In the field of child welfare, there have been government efforts to improve it through collaboration between related agencies, but it is still based on the figure of the PAUD mother. Analysis of the implementation of PAUD HI in Bandung Regency shows that there are several good practices in several PAUD units related to the implementation of PAUD-HI, the PAUD-HI programs that have been implemented are often still carried out partially and are not integrated. These obstacles become obstacles to the success of PAUD-HI

Keywords: early childhood education, holistic, education, program

A. PENDAHULUAN

Para ahli psikologi, pendidikan, dan juga kesehatan melihat masa enam tahun pertama merupakan masa yang paling penting dalam fase perkembangan seorang individu. Masa ini dianggap sebagai usia keemasan atau *golden age*. Sebagaimana dikemukakan oleh Elizabeth Hurlock (2001) serta Bredekamp dan Copple (1997), setiap stimulasi yang diterima oleh seorang anak pada masa ini akan memiliki dampak tidak saja bagi kehidupan anak saat ini, akan tetapi akan berpengaruh terhadap kehidupannya di masa yang akan datang.

Kesadaran akan pentingnya fase anak usia dini bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak serta bagi pembangunan sebuah negara ditunjukkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu indikator dari SDGs secara spesifik menegaskan peningkatan akses dan partisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas sebagai salah satu tujuan dari pembangunan global.

Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap tumbuh kembang anak usia dini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana penyelenggaraan PAUD berstatus formal, non formal dan informal bertumpu pada lima layanan utama yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Kelas Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD sejenis, dan PAUD Berbasis Keluarga. Komitmen pemerintah pun ditunjukkan melalui RPJMN tahun 2010-2014 yang secara tegas menyatakan PAUD sebagai bagian dari program nasional sejak tahun 2011-2012.

Pemerintah Kabupaten Bandungpun telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak usia dini ke PAUD. Salah satunya adalah dengan program Satu Desa, Satu PAUD yang mengamanatkan setiap desa untuk mendirikan PAUD. Pada tahun 2022, jumlah angka partisipasi kasar (APK) PAUD Kabupaten Bandung mencapai 31,86%. Pemerintah pun berkomitmen agar pada tahun 2024, APK PAUD dapat lebih meningkat lagi. Komitmen lain yang ditunjukkan pemerintah terhadap PAUD adalah dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik PAUD melalui pemberian insentif, pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya.



Di bidang kesehatan, pemerintah pun telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak usia dini. Salah satunya adalah melalui pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu. Pengintegrasian yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sebagaimana tertera dalam pasal 5 ayat (2) merupakan “Suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial”. Pengintegrasian layanan ini berupaya mensinergikan layanan Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di desa.

Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen penuh untuk tidak hanya meningkatkan akses dan partisipasi anak ke PAUD, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan untuk anak usia dini melalui PAUD, Posyandudan wadah lainnya dengan cara mengintegrasikan seluruh layanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini melalui program PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif) di Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) yang menjelaskan bahwa PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Dengan kata lain, PAUD-HI adalah sebuah upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak usia dini, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia mereka. Dalam pelaksanaannya, PAUD HI dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD, yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2015. Petunjuk teknis ini berisikan acuan minimal bagi penyelenggara, pengelola, dan pendidik dalam pelaksanaan PAUD-HI di satuan PAUD. Selain itu, petunjuk teknis ini juga berisikan acuan bagi pemangku kebijakan PAUD baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam membina pelaksanaan PAUD-HI di satuan PAUD.

Selain Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD-HI yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud ini, pada tahun 2018 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD-HI) yang mengembangkan arah, sasaran dan indikator dari PAUD-HI. Indikator capaian dari PAUD-HI ini dibagi kedalam beberapa bidang yaitu: a) Bidang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; b) Bidang Kesehatan Dan Gizi Anak Usia Dini; c) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; d) Bidang Perlindungan, Pengasuhan Dan Kesejahteraan Anak Usia Dini.

Meskipun pemerintah telah berupaya melakukan berbagai macam strategi untuk mencapai indikator RAN PAUD-HI, akan tetapi di Di Kabupaten Bandung persoalan PAUD HI tampaknya masih menjadi isu sentral karena sampai saat ini jumlah PAUD yang berada masih cukup banyak. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Bandung tahun 2022 sebesar 31.86 persen tergolong masih rendah di bawah target Jawa Barat juga target nasional. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan anak usia dini telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung yang secara tegas menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikerjakan oleh lintas sektoral.

Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan anak masih memerlukan penanganan yang serius dan komprehensif. Hal ini mengingat bahwa Anak usia dini sebagai potensi dan aset merupakan generasi penerus Bangsa dan sumberdaya manusia yang sangat



menentukan keberhasilan pembangunan pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu peningkatan implementasi PAUD HI merupakan hal yang sangat penting. Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan sejak dini sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik pertumbuhan fisik, mental, intelektual serta jaminan haknya.

Terdapat tiga bidang layanan anak usia dini yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, serta pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini. Saat ini, RAN PAUD-HI 2018-2019 di kabupaten Bandung masih dalam proses implementasi di sarana PAUD, namun disadari bahwa masih terdapat indikator-indikator yang belum menggambarkan penyelenggaraan unit layanan anak usia dini yang holistik dan integratif melibatkan banyak pihak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2022, satuan PAUD Kabupaten Bandung yang berjumlah 2036 lembaga. Dari jumlah tersebut, satuan PAUD yang telah mengimplementasikan PAUD HI adalah 40 Satuan PAUD di Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Baru sekitar 2% Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI, dari jumlah 2036 Satuan PAUD yang ada.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana PAUD HI diimplementasikan di satuan PAUD Kabupaten Bandung. Diharapkan studi yang dilakukan ini akan memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten Bandung.

B. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Paud HI

PAUD-HI merupakan sebuah inisiatif yang bukan hanya hadir di Indonesia, melainkan sebuah inisiatif yang juga hadir di negara-negara lain di dunia. Sejarah awal dari PAUD-HI dimulai pada tahun 2001, ketika *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* bersama dengan pemerintah Swedia menyelenggarakan sebuah konferensi internasional yang menyajikan hasil penelitian mengenai PAUD di berbagai negara (Haddad, L: 2006). Hasil kajian tersebut merekomendasikan beberapa hal yang menjadi faktor utama bagipeningkatan kualitas layanan PAUD. Faktor-faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh OECD. (2001) dalam karyanya: *Starting strong: early childhood education and care*:

1. Adanya layanan PAUD yang sistemik dan terintegrasi.
2. Adanya kerjasama lintas sektoral dalam pengembangan PAUD.
3. Adanya akses yang universal terhadap layanan PAUD.
4. Adanya investasi publik terhadap PAUD.
5. Adanya pendekatan partisipatoris dari masyarakat terhadap PAUD.
6. Adanya mekanisme peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik PAUD
7. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan layanan PAUD.
8. Adanya framework yang dapat memberikan panduan layanan PAUD dan evaluasi program.

Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan PAUD- HI. PAUD-HI sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Miškeljin (2013) yang menekankan pentingnya perubahan paradigma dari yang semata-mata hanya menitikberatkan pada aspek pendidikan saja (dan cenderung melupakan aspek *care/* pengasuhan) dan hanya memandang PAUD sebagai tanggung jawab dari salah satu pihak saja dalam hal ini orang tua atau

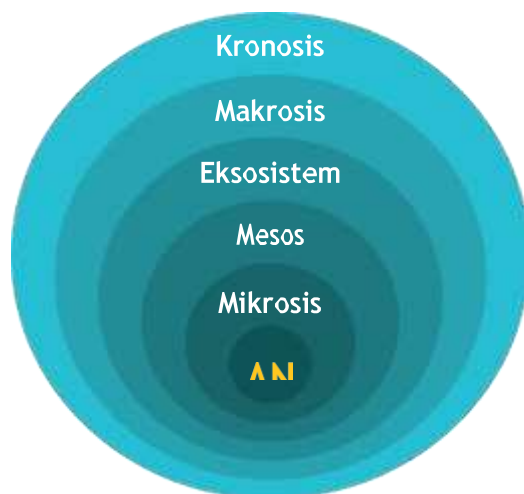


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semata. Perubahan paradigma yang dimaksud sebagaimana dikemukakan Miškeljin, L. (2013) dan Haddad, L. (2006) berikut:

Perubahan paradigma ini menjelaskan perlunya kerjasama yang terintegrasi antara berbagai stakeholder dan lembaga terkait demi meningkatnya kualitas layanan PAUD bagi anak. Secara lebih khusus, perubahan paradigma ini melihat perkembangan anak sebagai sesuatu yang holistik. Anak usia dini tidak hanya terbatas kepada anak berusia 3 sampai 6 tahun, akan tetapi perkembangan seorang anak sudah dilihat dari sejak berada dalam kandungan. Selain itu, pandangan ini juga melihat pentingnya stimulasi perkembangan anak baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan juga perlindungan serta pengasuhan.

Konsep PAUD-HI sendiri dipengaruhi oleh pandangan ekologi yang dikembangkan oleh Bronfenbrenner, U. (1979) dalam bukunya *The ecology of human development*:

1. Redefinisi ulang peran negara dengan peran keluarga, termasuk didalamnya peran swasta terkait dengan tumbuh kembang anak.
2. Mengakui anak sebagai bagian dari lingkungan sosial yang akan dibesarkan bukan hanya oleh keluarga tapi juga oleh lingkungan dimana anak berada.
3. Mengakui tenaga pendidikan PAUD sebagai tenaga profesional yang merupakan bagian dari sistem pendidikan sebuah negara.
4. Mengoptimalkan berbagai cara untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini.



Gambar 1. Teori Ekologi

Sumber: The Psychology Notes Headquarters.
<https://www.psychologynoteshq.com/bronfenbrenner-ecological-theory/>

Menurut teori ini perilaku dan perkembangan seorang anak tidaklah mutlak merupakan bentukan dari anak sendiri, melainkan karena faktor-faktor sosial, ekonomi, bahkan politik di daerah dimana anak itu berada. Karenanya menurut pandangan ini, untuk mengoptimalkan perkembangan seorang anak, perlu kerjasama



orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah atau Negara serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Saat ini Swedia merupakan negara yang telah melaksanakan prinsip-prinsip layanan PAUD-HI meskipun tidak secara tegas menggunakan istilah tersebut. Hasil kajian yang dilakukan oleh OECD tanpa diragukan telah mendorong negara-negara lain termasuk Indonesia untuk juga mengakomodasi paradigma ini.

KONSEP PAUD HI DI INDONESIA

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. Anak usia dini yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun. Simultan artinya bahwa seluruh layanan PAUD haruslah berupaya memenuhi aspek pendidikan, kesehatan serta perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usiadini. Sistematis artinya seluruh layanan yang diberikan haruslah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang terencana dan mengacu kepada prinsip-prinsip PAUD dan perkembangan anak. Terintegrasi artinya seluruh layanan yang diberikan haruslah memperhatikan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antara K/L yang berkepentingan.

TUJUAN PAUD HI DI INDONESIA

1. TUJUAN UMUM

Tujuan umum dari PAUD-HI berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.

2. Tujuan Khusus

Sementara itu, tujuan khusus dari PAUD-HI masih berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembina moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur
- b. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada
- c. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah
- d. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

PRINSIP PELAKSANAAN PAUD HI



Menurut Petunjuk Teknik Penyelenggaraan PAUD-HI yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, terdapat beberapa prinsip pelaksanaan PAUD-HI:

- a. Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi. Satuan PAUD sebagai wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan.
- b. Pelayanan yang berkesinambungan yakni layanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun.
- c. Pelayanan yang non diskriminasi yakni layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak yang ada di satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan (SARA).
- d. Pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat yakni lokasi layanan PAUD-HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya.
- e. Partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PAUD-HI sehingga rasa memiliki program dari oleh masyarakat menjadi lebih kuat.
- f. Berbasis budaya yang konstruktif yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD-HI.
- g. Tata kelola yang baik yakni pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif untuk melaporkan hasil implementasi PAUD-HI di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif yang dilakukan, diharapkan akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan kesulitan yang dihadapi ketika mengimplementasikan program PAUD-HI. Pada saat yang sama, pendekatan kualitatif pun diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik baik seputar pelaksanaan PAUD-HI ini. Selain itu, studi ini juga menggunakan studi literatur dan juga survai.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari praktisi dan stakeholder dalam bidang PAUD-HI yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unsur terkait. Dari tingkat kabupaten merupakan anggota Pokja Bunda PAUD yang juga sub gugus tugas PAUD-HI kabupaten Bandung, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sedangkan dari tingkat kecamatan adalah tenaga pendidik Lembaga PAUD, perwakilan Pokja Bunda PAUD kecamatan, Pemerintah desa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat dalam implementasi PAUD-HI di kecamatan.

Apaun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dan mengacu kepada pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
2. pengisian kuisisioner, yang berisikan pernyataan-pernyataan yang merupakan indikator PAUD-HI 2020- 2024 untuk bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan.
3. Observasi pun dilakukan terhadap lembaga- lembaga PAUD yang ada di kecamatan kajian, dengan populasi sebanyak 2036 sekolah dan menentukan sampel menggunakan teknik random sampling sebanyak 62 partisipan dari batas toleransi sebesar 5%
4. FGD dilakukan sebagai bagian dari proses triangulasi atau pengecekan data. Pertanyaan yang diajukan ketika FGD sama dengan pertanyaan yang diajukan ketika wawancara. Hanya saja ketika FGD dilakukan, partisipant dibagi kepada tiga kelompok sesuai dengan bidang yang terdapat pada PAUD-HI yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Paud Hi Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung

Dari hasil kajian di berbagai daerah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga isu besar di bidang Pendidikan yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi PAUD-HI. Pertama adalah isu akses dan partisipasi, yang kedua isu kompetensi dan profesionalisme guru, serta yang terakhir isu kualitas lembaga PAUD.

1. Akses dan Partisipasi

Di beberapa tempat (misalnya di daerah Ereng kecamatan PASEH) implementasi PAUD-HI masih mengalami kesulitan untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak ke lembaga PAUD, sebagai berikut:

- a. asumsi bahwa anak usia dini belum perlu untuk mendapatkan pendidikan. Di samping karena tingkat kemiskinan juga karena rendahnya pemahaman dan kesadaran orangtua akan pentingnya PAUD turut berkontribusi terhadap minimnya akses dan partisipasi anak ke PAUD.
- b. masih ada sekitar 60% anak usia dini Kabupaten Bandung yang sekolah di lembaga yang tidak terdaftar di NPSN, sehingga tidak aktif di dapodik atau emis. Hal ini mengakibatkan belum semua lembaga PAUD di Kabupaten Bandung menerima dana BOP. Konsekuensinya lembaga PAUD acapkali hanya mengandalkan dana personal atau yayasan yang terbatas sifatnya sehingga lembaga PAUD belum mampu menganggarkan dana untuk kegiatan PAUD-HI.
- c. Pemerintah daerah sudah berupaya meningkatkan akses dan partisipasi anak ke lembaga PAUD, akan tetapi masih mengalami kendala dalam dana desa yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun PAUD di desa- desa.
- d. Pada program PAUD-HI Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pun masih terfokus kepada anak berusia 3-6 tahun. Sebagai akibatnya anak usia 0-3 tahun seringkali luput dari perhatian pemerintah.
- e. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung telah berkomitmen untuk mensukseskan program satu desa satu PAUD, sehingga diharapkan program ini akan meningkatkan angka partisipasi kasar anak ke lembaga PAUD.
- f. Sudah ada koordinasi antara lembaga pendidikan PAUD Non Formal, dan Formal (TK). Koordinasi ini terlihat ketika lembaga PAUD Non Formal yang ada, memutuskan tidak membuka kelas untuk anak berusia 4-6 tahun di desa tersebut, melainkan justru merekomendasikan anak untuk masuk ke TK



terdekat.

- g. Pemerintah desa untuk memastikan setiap anak di setiap desa terlayani PAUD-HI.

2. Kompetensi dan Kualifikasi Guru

Sebagaimana data yang dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa Kabupaten Bandung memiliki 4442 orang. Dari sejumlah itu, sebanyak 3275 guru telah memiliki gelar S1 dan tersertifikasi sebanyak 679 orang.

Praktek baik terkait dengan upaya yang dilakukan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan kualifikasi guru PAUD dilakukan dengan memberikan bantuan yang dialokasikan untuk membantu kesejahteraan guru, terutama guru non PNS. Program insetif guru honorer PAUD tahun 2022 menysasar target 4220 Guru PAUD. Mereka menerima bantuan sebesar Rp.350.000,-/bulan dibayarkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Guru yang belum mendapat bantuan dari manapun dan di data melalui klasifikasi prioritas.

Di Kabupaten Bandung, jumlah guru yang tersertifikasi sebanyak 679 orang. Maka, selanjutnya pemerintah daerah menyelenggarakan program untuk percepatan Sertifikasi (PPG). Selain itu, pemerintah pun mengadakan kegiatan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan) dengan menyelenggarakan pelatihan berikut narsum di setiap kecamatan. Selanjutnya, pemerintah daerah pun memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas melalui Program Beasiswa berkelanjutan dengan target 156 guru yang diberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000 per tahun.. Adapun untuk guru PAUD non-formal, pelaksanaan kegiatan Bimtek Perencanaan Pembelajaran PAUD disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kegiatan Diklat Berjenjang pun rutin diadakan dengan pembiayaan dari PEMDA. Selain itu, lembaga-lembaga PAUD di Kabupaten Bandung pun melakukan koordinasi dengan Dinkes, DP2KBP3A, Damkar, Polres, Kantor Pos, Pertanian dalam rangka pengenalan dan peningkatan pengetahuan terhadap kegiatan layanan masyarakat. Kegiatan ini terbukti dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi guru di daerah tersebut.

3. Kualitas Layanan dan Lembaga PAUD

Kualitas layanan dan kualitas lembaga PAUD pun masih menjadi salah satu hambatan dalam implementasi program PAUD-HI. Di Kabupaten Bandung jumlah PAUD yang sudah terakreditasi masih terus dilakukan upaya secara masif, dan pada tahun 2022, dari 2036 Satuan PAUD, 1429 satuan PAUDnya sudah terakreditasi, minimal B.

Selain itu, dalam proses pembelajaran, di beberapa satuan PAUD ini masih menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred) dan belum sepenuhnya berpusat pada anak (child-centred).

Implementasi Program Paud Hi Bidang Kesehatan Di Kabupaten Bandung

Untuk layanan di bidang kesehatan, kebanyakan daerah sudah melakukan integrasi antara lembaga PAUD dengan lembaga kesehatan yang ada di daerahnya. Di beberapa daerah, bahkan dapat dikatakan bahwa layanan kesehatan menjadi bidang prioritas daerah tersebut, terutama terkait dengan adanya Instruksi Presiden mengenai stunting. Pelaksanaan PAUD-HI sebagian besar terfokuskan kepada integrasi antara layanan kesehatan dan pendidikan. Intervensi kegiatan banyak melibatkan PUSKESMAS dan PKK setempat untuk pengukuran tinggi dan berat badan anak, termasuk pemberian vitamin dan makanan sehat secara berkala. Selain itu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh beberapa satuan PAUD, membagikan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada beberapa Posyandu. Selain itu, prioritas dari layanan yang terkait dengan PAUD-HI adalah menurunkan angka penderita



stunting di kalangan anak usia dini. Selain itu melalui kerjasama yang dilakukan dengan berbagai LSM, program-program yang terkait dengan sanitasi pun telah banyak dilakukan.

Program kesehatan banyak mendapatkan perhatian. Di PAUD Saayunan Kecamatan Soreang misalnya, terdapat kegiatan yang bekerjasama dengan Posyandu setempat untuk program penyediaan makanan sehat dan penimbangan berat badan anak. Demikian juga kerjasama dilakukan Satuan PAUD dengan dinas kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap anak berusia 0-3 tahun.

Di Pos PAUD Oriza Sativa 1, 2, 3, 4 Kecamatan Cileunyi, perhatian terhadap bidang kesehatan ini bahkan mampu menggerakkan kerjasama lintas sektor. Sebagai contoh melalui mekanisme rapat desa, dapat ditentukan pembagian peran antara PAUD, TK dan Posyandu. Posyandu secara rutin mengunjungi lembaga PAUD untuk kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan anak-anak berusia 2-4 tahun di PAUD tersebut.

Untuk bidang kesehatan, hampir seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Bandung telah menjalin kerjasama dengan Puskesmas dan Posyandu di wilayahnya sehingga anak-anak PAUD secara berkala memperoleh pemeriksaan kesehatan. Kerjasama dengan bidang kesehatan pun dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama antara lembaga PAUD dengan Posyandu dan BKB. Meskipun demikian, masih terdapat persoalan seputar kesehatan. Tingkat stunting yang masih cukup tinggi membuat hal ini pun menjadi prioritas pemerintah daerah.

Nampaknya fokus dari layanan PAUD-HI di bidang kesehatan masih terpusat kepada kesehatan anak. Meskipun daerah sudah melaksanakan beberapa program yang terkait dengan program kesehatan untuk ibu hamil, akan tetapi perspektif dari tenaga kesehatan belum dilandaskan kepada perspektif PAUD-HI. Dengan kata lain, nampaknya kesehatan ibu dan anak masih belum dilihat sebagai sebuah kesatuan yang utuh.

Implementasi Program Paud Hi Bidang Perlindungan, Pengasuhan Dan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Bandung

1. Bidang Perlindungan

Di bidang perlindungan sudah terdapat pelayanan pembuatan akte kelahiran kepada anak, serta pembuatan Kartu Anak, sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak. Beberapa lembaga PAUD telah berupaya bekerjasama dapat melibatkan pihak lain seperti Disdukcapil sebagai upaya mengatasi permasalahan terkait dengan pendataan peserta didik.

Di Kabupaten Bandung, masih banyak persoalan yang dihadapi dalam bidang perlindungan, meskipun perhatian pemerintah setempat untuk mengurangi angka kekerasan cukup tinggi. DP2KBP3A kabupaten Bandung telah berupaya melakukan sosialisasi Perlindungan Anak dengan melibatkan PKK dan juga guru PAUD. Sosialisasi dan program lainnya diarahkan untuk menjadikan Bandung menjadi Kabupaten Layak Anak, salah satunya dengan memastikan layanan PAUD yang Ramah Anak. Selain itu, salah satu praktik baik lain terkait dengan pelaksanaan PAUD-HI di bidang pengasuhan, Kabupaten Bandung telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD). Melalui kerjasama yang dilakukan oleh BKKBN dan LSM seperti Save the Children, lembaga-lembaga PAUD giat melaksanakan program-program parenting. Selain program parenting yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga PAUD, kader BKB dan Posyandu pun secara rutin mendapatkan pelatihan mengenai parenting. Hasil kegiatan ini telah melahirkan luaran modul parenting yang



disosialisasikan kepada orang tua. Program parenting pun telah mengembangkan program keluarga hebat dan parenting ayah hebat sebagai upaya melibatkan ayah dalam proses pengasuhan anak. Kabupaten Bandung juga telah berusaha mengembangkan SOP di setiap lembaga PAUD terkait bagaimana melindungi anak dari segala tindak kekerasan baik di rumah maupun sekolah, termasuk didalamnya mencoba mengembangkan *referral system* apabila anak mengalami kekerasan. Hal ini dilakukan mengingat tingkat kekerasan, terutama kekerasan fisik dan seksual pada anak-anak di daerah Kupang cukup tinggi.

2. Bidang pengasuhan

Di bidang pengasuhan, telah terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Satuan PAUD, misal dengan berupaya mengatasi kekerasan terhadap anak dengan cara melaksanakan program parenting kepada orang tua.

Di bidang perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak usia dini, meskipun masih banyak persoalan yang dihadapi akan tetapi perhatian pemerintah setempat untuk mengurangi angka kekerasan cukup tinggi. Dinas Perlindungan Anak dan KB melakukan sosialisasi Perlindungan Anak dengan melibatkan PKK dan guru PAUD.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang terkait dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat terkait seperti masih tingginya tingkat kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu fenomena lain yang cukup sering terjadi adalah fenomena tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak serta masih terdapat anak terlantar. Hal ini nampaknya menunjukkan perlunya koordinasi antar lembaga yang dimulai dari Dinas Sosial.

3. Bidang Kesejahteraan Anak

Pada dasarnya kesejahteraan anak merupakan dampak kulminatif yang akan dicapai ketika anak telah mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Meskipun demikian hasil kajian menunjukkan ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi di daerah terkait dengan implementasi di bidang ini. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, Kabupaten Bandung memiliki penekanan yang kuat terhadap upaya pemenuhan hak anak. Hal ini terlihat dari koordinasi yang kerap dilakukan oleh lembaga-lembaga PAUD dengan dinas sosial di daerah ini.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak ini dilihat dari kerjasama yang dilakukan antara dinas-dinas terkait, LSM dan juga pihak swasta. Ditambah lagi peran dan komitmen yang tinggi dari Bunda PAUD membuat beberapa program inovatif berhasil dilaksanakan.

Analisis Hambatan Implementasi Paud Hi Di Kabupaten Bandung

Hasil analisa dalam studi ini menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa praktek baik di beberapa satuan PAUD terkait dengan implementasi PAUD-HI, akan program PAUD-HI yang telah dilaksanakan seringkali masih dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi. Kendala-kendala tersebut menjadi penghambat keberhasilan PAUD-HI ini. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi adalah:

1. Isu Tata Kelola

- a. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki aturan dalam hal ini peraturan daerah mengenai PAUD-HI. Sehingga dikhawatirkan akan muncul ketergantungan dari lembaga PAUD terhadap LSM atau CSR, khususnya LSM/ CSR yang berasal



dari luar negeri. Hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan/ keberlanjutan dari program PAUD-HI yang ada.

- b. Belum ada petunjuk teknis yang mengatur koordinasi antara dinas-dinas dan stakeholder terkait. Juknis yang dimaksud juga dapat mengatur tata kelola dari masing-masing dinas dan pihak terkait. Implementasi PAUD-HI di daerah selama ini lebih banyak didorong oleh peran LSM atau inisiatif personal, dalam hal ini peran Bunda PAUD. Figuritas cukup kuat dalam pelaksanaan program PAUD-HI di Kabupaten Bandung. Persoalan mendasar dengan figuritas adalah memastikan bahwa pelaksanaan program PAUD-HI bukan semata-mata karena adanya sosok tertentu seperti kepala TK yang visioner atau adanya Bunda PAUD, tetapi bagaimana memastikan bahwa ini menjadi sebuah pendekatan yang sistematis sehingga dapat bertahan lebih lama.
 - c. Pelaksanaan PAUD-HI belum sepenuhnya mengintegrasikan tiga bidang PAUD-HI. Hampir di seluruh daerah kajian, layanan yang diberikan banyak terpusat kepada satu layanan tertentu, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Nampaknya masih sedikit satuan PAUD yang telah mengintegrasikan tiga bidang PAUD-HI yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan, perlindungan serta kesejahteraan anak usia dini secara holistik. Padahal filosofi dari PAUD-HI adalah bagaimana memastikan seorang anak mendapatkan lima layanan PAUD-HI.
 - d. Belum semua pemerintah desa mempunyai aturan yang mengikat yang mengharuskan alokasi dana desa untuk PAUD. Dari hasil FGD yang dilakukan dengan pemerintah desa misalnya, desa masih ragu-ragu untuk mengeluarkan anggaran dari dana desa bagi pengembangan PAUD-HI. Hal ini terjadi karena nomenklatur yang kurang jelas mengenai ungkapan “PAUD milik desa”. Beberapa pihak menterjemahkan ini sebagai PAUD yang dilahirkan dan diciptakan oleh desa, dengan desa sebagai pemilik. Sebagian pihak mengartikan ini sebagai PAUD yang berada di desameskipun PAUD tersebut dimiliki oleh yayasan atau individu. Ketidakjelasan nomenklatur ditambah dengan minimnya dukungan dana ini berakibat tingginya tingkat ketergantungan dari lembaga PAUD terhadap LSM tadi.
 - e. Belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur implementasi PAUD-HI ra stakeholder di lapangan, baik antara dinas maupun antara LSM/ CSR yang ada di daerah.
2. Isu Kualifikasi dan Kompetensi Aktor yang akan Melaksanakan PAUD-HI
 - a. Masih kurangnya pemahaman stakeholder terkait dengan konsep PAUD-HI ini. Kecuali untuk bidang kesehatan yang telah banyak memiliki program untuk anak-anak berusia 0 sampai 3 tahun, masing banyak peserta dari kalangan pemerintah yang memahami anak usia dini sebagai anak yang berusia 3 sampai 6 tahun. Akibatnya anak-anak yang berusia di bawah 3 tahun masih luput dari perhatian pemerintah.
 - b. Masih banyak dari para pelaku utama yang akan melaksanakan PAUD-HI baik dari bidang pendidikan; kesehatan; dan perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak yang belum memahami mengenai esensi dari PAUD itu sendiri, apalagi memahami mengenai PAUD-HI.
 3. Isu terkait Enabling Environment (faktor-faktor pendukung)
 - a. Masih terdapat lembaga PAUD di Kabupaten Bandung yang belum terdaftar di NPSN dan Dapodik/ Emis, akibatnya belum semua lembaga PAUD menerima dana BOP. Konsekuensinya lembaga PAUD acapkali hanya mengandalkan dana personal



Sedangkan APK PAUD tahun 2022/2023 adalah 44.53, hal ini mengalami kenaikan sekitar 12.67%. Namun demikian masih di bawah APK PAUD Provinsi yang sudah mencapai 45.68%. Selain angka partisipasi kasar, isu lain yang dihadapi di bidang pendidikan anak usia dini adalah kualitas PAUD itu sendiri. Menurut data di Dapodik, PAUD di kabupaten Bandung tahun 2022 sebanyak 2068 satuan PAUD (terdiri dari TK, KB, TPA dan SPS), 70280 Peserta Didik, 4442 orang guru, serta 4338 Rombongan Belajar, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Data Guru Paudtercatat Dalam Dapodik

JENIS SATUAN	JMLH LEMBAGA	JUMLAH PD	JUMLAH GURU	JUMLAH ROMBEL
TK	635	24029	1548	1529
KB	1033	32335	2046	1989
TPA	14	231	22	21
SPS	386	13685	826	799
JUMLAH	2068	70280	4442	4338

Sumber : Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2022

Salah satu isu penting terkait kualitas terkait dengan tingkat profesionalisme guru. Sebagaimana dikemukakan oleh Dahlberg, Moss & Pence (2007), guru yang berkualitas diyakini dapat mengembangkan PAUD yang juga berkualitas. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas menyatakan bahwa guru dan dosen merupakan pekerjaan dan jabatan yang profesional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 29 menyatakan bahwa untuk guru PAUD diakui sebagai pendidik profesional maka guru PAUD perlu memiliki ijazah D IV atau S1 di bidang PAUD atau psikologi dan tersertifikasi.

Tabel 2. Data Kualifikasi Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	LAINNYA	JUMLAH
2	28	928	82	37	89	4	3176	88	7	1	4442

Sumber : Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2022

Masih cukup banyaknya guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi S1 dan tersertifikasi merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi kualitas layanan PAUD di Kabupaten Bandung. Karena bagaimanapun kualifikasi erat kaitannya dengan kualitas. Guru yang berkualitas akan lebih memahami dan berupaya memenuhi tumbuh kembang seorang anak.

Persoalan lain yang dihadapi terkait dengan kualitas guru PAUD terkait dengan klasifikasi lembaga PAUD pada lembaga PAUD formal dan non-formal. Saat ini, aturan sertifikasi guru PAUD baru terbatas kepada lembaga PAUD formal. Sehingga lembaga PAUD non-formal seringkali memiliki masalah terkait dengan kualifikasi guru. Mayoritas



guru yang mengajar di lembaga PAUD non formal merupakan ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan masih lebih rendah dari S1.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hasil studi ini menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa praktek baik di beberapa Satuan PAUD terkait dengan implementasi PAUD-HI, anatar lain:

1. Implementasi Program Paud Hi Bidang Pendidikan Pemerintah sudah sudah berupaya meningkatkan akses dan partisipasi anak di semua lembaga PAUD; memberikan bantuan insentif bagi kesejahteraan guruserita meberikan pelatihan-pelatihan terkait PAUD HI; serta belum banyak satuan PAUD yang bisa mandiri atau mendapat bantuan dari LSM/ CSR terkait program PAUD HI.
2. Implementasi Program Paud Hi Bidang kesehatan, hampir semua satuan PAUD sudah melakukan integrasi dengan lembaga kesehatan yang ada di daerahnya
3. Implementasi Program Paud Hi Bidang perlindungan anak di Kabupaten Bandung, sudah terdapat inovasi dari Disdukcapil dengan layanan pembuatan akte kelahiran serta membuat Kartu Identitas Anak sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak; Di bidang pengasuhan, telah terdapat beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Satuan PAUD, dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait; Dalam bidang kesejahteraan anak, sudah terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkannya dengan kerjasama yang dilakukan antara dinas-dinas terkait, namun masih berdasar ketokohan Bunda PAUD.
4. Analisa Implementasi PAUD HI di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa praktek baik di beberapa satuan PAUD terkait dengan implementasi PAUD-HI, akan program PAUD-HI yang telah dilaksanakan seringkali masih dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi. Kendala-kendala tersebut menjadi penghambat keberhasilan PAUD-HI ini

Rekomendasi

Berdasarkan temuan kajian PAUD HI di Kabupaten Bandung, rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola PAUD HI di Kabupaten Bandung harus memiliki dokumen RAN PAUD HI yang menjadi dasar dikembangkannya RAD PAUD HI dan dibuatkan petunjuk teknis yang mengatur koordinasi antara dinas-dinas dan stakeholder terkait. Selain itu , PAUD juga harus di idukung dengan regulasi di tingkat kabupaten seperti Peraturan Daerah, yang akan memberikan panduan implementasi PAUD-HI, dengan merujuk pada 4 tujuan khusus PAUD- HI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden RI No.60 Tahun 2013 tentang PAUD-HI.
2. Kualifikasi dan kompetensi aktor yang melaksanakan PAUD-HI di Kabupaten Bandung sebaiknya memiliki program kegiatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang esensi dari PAUD-HI;
3. Indikator pendukung lain harus disiapkan, diantaranya:
 - a. Dibuatkan regulasi yang mewajibkan seluruh satuan PAUD di Kabupaten Bandung agar terdaftar di NPSN dan Dapodik/ Emis
 - b. Pendampingan dan monitoring terkait pemanfaatan dana BOP untuk kegiatan PAUD HI secara optimal
 - c. Perlu adanya optimalisasi peran dari swasta melalui dana CSR
 - d. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi antara LSM dan Pemerintah setempat



REFERENSI

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Jakarta; Kementerian Kesehatan
- Bredenkamp, S., & Copple, C. (1997). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs (Revised Edition)*: ERIC.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*: Harvard university press.
- Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2007). *Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Language of Evaluation* (3rd ed.). Oxon and New York: Falmer Press.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (2017). Pendayagunaan Data oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
- Haddad, L. (2006). Integrated policies for early childhood education and care: Challenges, pitfalls and possibilities. *Cadernos de Pesquisa*, 36(129), 519-546.
- Hurlock, E. B. (2001). *Developmental psychology*: Tata McGraw-Hill Education.
- Kemenppppa (2016). Pembangunan Ketahanan Keluarga. Jakarta; Kemenppppa
- Kemenppppa (2018). Pentingnya Keabsahan Anak. Artikel diakses pada <https://www.kemenppppa.go.id/index.php/page/read/31/1875/pentingnya-keabsahan-anak>
- Miškeljin, L. (2013). Integrated Policies for Early Childhood Education and Care– Challenges and Possibilities. *Miomir Despotović EminaHebib*, 363.
- OECD. (2001). Starting strong: early childhood education and care. Paris: Education and Training Division.
- OHCHR(1989). Convention of the Right of the Child. Artikel dapat diakses pada <https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- Sahabat Keluarga (2019). Mendikbud: PAUD Dimulai sejak Dalam Kandungan. Artikel diakses melalui <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/index.php?r=tpost/xview&id=249900317>
- Worldbank (n.a.). Apa Potensi Keuntungan Perbaikan Kesehatan dan Gizi Anak Usia Sekolah. Artikel diakses pada situs <http://documents.worldbank.org/curated/en/343721468044658305/pdf/519520REVISED01ief1INDO1Final1LoRes.pdf>
- Yohanes usfunan, 2016, Perancangan Dan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Makalah disampaikan Dalam Pelatihan Penyusunan Naskah Akademik, Diselenggarakan Unit Pusat Perancangan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (2)



- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Kemensos
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
- Instruksi Presiden Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di POSYANDU Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Desa No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.



Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Jurnal Perempuan (Untuk Pencerahan dan Kesetaraan), *Sejauh Mana Komitmen Negara ? Diskriminasi Terhadap Perempuan*, ISSN : 1410-153X,2006.